



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FARHAN**
2. Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3. NHK : **648890**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.888.750.000**

1. Tanah Seluas 1.322 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. Tanah Seluas 584 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, Rp. 29.200.000
3. Tanah Seluas 427 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 384.300.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 607 m2/150 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.455.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 212.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOBIL, VW BEETLE Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 318.100.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.671.189
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.426.521.189
III. HUTANG	Rp.	291.937.485
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.134.583.704

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.